

**PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DALAM  
LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA AUDITED**

**RINGKASAN SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana**



**Disusun Oleh:**

**Puput Cahyaningrum**

**112131836**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI  
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA  
YOGYAKARTA**

# **TUGAS AKHIR**

## **SKRIPSI**

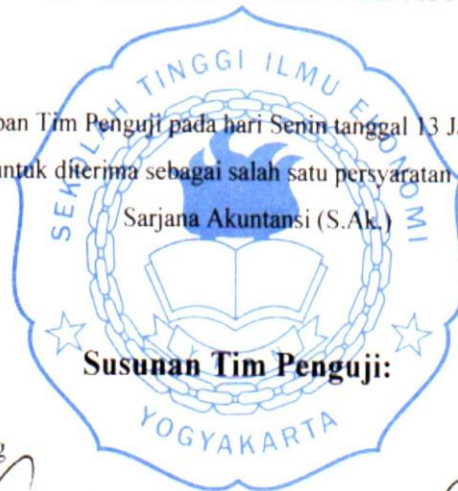
### **PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DALAM LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA *AUDITED***

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**PUPUT CAHYANINGRUM**

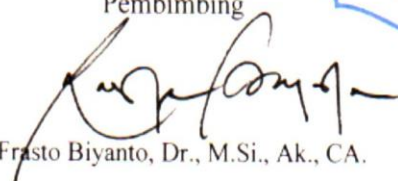
**Nomor Induk Mahasiswa: 112131836**

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.)

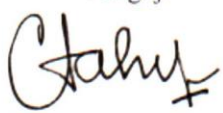


#### **Susunan Tim Penguji:**

Pembimbing

  
Frasto Biyanto, Dr., M.Si., Ak., CA.

Penguji

  
Cahyo Indraswono, SE., M.Sc., Ak., CA.

Yogyakarta, 15 Januari 2025  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta  
Ketua

  
Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

## ABSTRACT

*This study analyzes the effect of transparency and accountability on Government Agency Performance Accountability (AKIP) in the audited annual financial statements of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, focusing on the period 2016 - 2023. Transparency, as an important element of good governance, plays a role in increasing transparency through the publication of publicly accessible financial reports. Although the Covid-19 pandemic in 2020-2021 resulted in data limitations. The results showed that good transparency contributes to improving the accountability of government agencies. Agencies that are able to account for their performance well will produce quality financial reports. This study also found that transparency and accountability simultaneously affect AKIP. The implications of this study indicate that increasing transparency and accountability in state financial management can strengthen public trust in the government. Therefore, it is recommended that policy makers and practitioners develop strategies to improve transparency and accountability in state financial management.*

*Keywords: transparency, accountability, performance, government, Covid-19*

## PENDAHULUAN

Di masa keterbukaan informasi saat ini, kebutuhan utama para pengguna informasi publik adalah informasi yang menyeluruh dan terbuka tentang pertanggungjawaban kinerja badan publik. Hal ini terutama berlaku untuk aktivitas yang berkaitan dengan dana yang berasal dari APBN, yang merupakan kepanjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBD, yang merupakan singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumbangan dari masyarakat dan negara asing. Ini tampaknya menunjukkan bahwa kegiatan yang berkaitan dengan anggaran seringkali berbalik melawan akuntabilitas kinerja. Hal ini dikarenakan jika pengelolaan keuangan yang buruk dikombinasikan dengan sasaran anggaran yang salah, maka dampak negatifnya dapat menyebabkan rendahnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mana masih menjadi masalah yang terus disoroti oleh masyarakat (Anggaran et al., 2021). Sesuai dengan Peraturan

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Pertanggungjawaban yang Jelas dan Tepat, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban laporan pemerintah (Dewata et al., 2020).

Pentingnya pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel telah mendapatkan pengakuan luas di bidang sektor publik (Purwaningsih, 2022). Di Kementerian Keuangan Republik Indonesia, penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam publikasi laporan yang telah di audit, sangat penting untuk membangun kepercayaan publik, menekan tingkat korupsi, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan secara keseluruhan. Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual diharapkan dapat meningkatkan kualitas serta keandalan informasi yang disajikan dalam laporan – laporan tersebut, sehingga para pemangku kepentingan dapat mengambil keputusan dengan tepat (Meinarsih et al., 2020).

Pada penelitian oleh Judijanto (2024) menunjukkan adanya perubahan fokus dalam pelaporan yang beralih dari pendekatan yang lebih komprehensif menuju praktik tata kelola dan etika yang lebih kompleks. Temuan ini menekankan pentingnya hubungan antara pelaporan keuangan dengan peningkatan tata kelola serta kepercayaan publik. Transparansi terbukti berperan penting dalam mengurangi tingkat korupsi dan meningkatkan integritas di sektor publik. Transparansi dalam pengelolaan keuangan negara sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi mengenai penggunaan dana. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga mampu mendorong instansi pemerintahan untuk bertindak lebih bertanggung jawab. Dalam konteks ini, laporan keuangan yang jelas dan terbuka menjadi alat yang penting untuk menilai kinerja instansi pemerintah (Zahra et al., 2023).

Akuntabilitas juga merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan negara yang mengharuskan instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan dana yang telah dialokasikan kepada masyarakat. Dalam situasi krisis seperti pandemi Covid-19, akuntabilitas menjadi sangat penting karena masyarakat berhak

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mengetahui bagaimana dana dialokasikan untuk penanganan kesehatan serta pemulihan ekonomi nasional (Veronica Wongkar et al., 2024).

Dalam menghadapi situasi pandemi, pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menangani dampak ekonomi, termasuk program bantuan sosial dan stimulus ekonomi. Namun, kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran ini menimbulkan keraguan masyarakat mengenai efektivitas pengalokasian dana. Banyak yang merasa bahwa informasi mengenai alokasi dan penggunaan anggaran tidak disampaikan dengan jelas, yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah (Zahra et al., 2023). Secara keseluruhan, dampak pandemi Covid-19 di Indonesia tidak hanya mempengaruhi aspek ekonomi, tetapi juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan meningkatkan kedua aspek, baik transparansi maupun akuntabilitas, diharapkan pemerintah dapat membangun kembali kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa dana masyarakat dialokasikan secara efektif untuk pemulihan ekonomi (Zahra et al., 2023). Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, peneliti berkeinginan untuk mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dalam Laporan Keuangan Tahunan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Audited.

## TINJAUAN PUSTAKA

Teori *Good Governance* adalah teori utama yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut Maranjaya (2022), *good governance* adalah pendekatan dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi dan keuangan untuk mendukung pembangunan masyarakat, terutama berkaitan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau keuangan publik. Konsep ini berfokus pada aspek ekonomi, termasuk analisis terhadap kegiatan negara di bidang ekonomi, khususnya terkait input, output, serta dampak yang dihasilkan.

Transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan independensi merupakan komponen utama dari konsep *good governance*. Hal tersebut penting karena penerapan prinsip *good corporate governance* dapat meningkatkan kualitas laporan



# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

keuangan dan juga dapat menghambat proses rekayasa kinerja yang dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak menunjukkan nilai dasar perusahaan (Febrianty & Atmadja, 2021). Teori *good governance* dipilih sebagai *grand theory* dalam penelitian ini karena teori tersebut mencakup komponen utama berupa transparansi dan akuntabilitas. Kedua komponen tersebut sesuai dengan penelitian ini yang menggunakan Transparansi dan Akuntabilitas sebagai variabel independen (X) yang mempengaruhi variabel dependen (Y), yaitu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dalam laporan keuangan tahunan Kementerian Keuangan Republik Indonesia *audited*.

Transparansi berasal dari kata *transparent*, yang berarti sesuatu yang jelas, nyata, dan terbuka. Transparansi dapat diartikan sebagai kejelasan atau keterbukaan dalam penyampaian informasi. Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, (2008) tentang Keterbukaan Informasi Publik, transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan dengan perusahaan. Transparansi adalah keterbukaan dalam menjelaskan kondisi suatu kegiatan, baik yang akan, sedang, maupun yang sudah dilaksanakan, serta sumber daya apa saja yang sudah digunakan selama kegiatan tersebut, sehingga terdapat informasi yang disampaikan (Fajri et al., 2024).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahayu (2022), prinsip – prinsip transparansi, yaitu: ketersediaan informasi yang mudah dipahami dan diakses, termasuk rincian dana/biaya, metode pelaksanaan, serta program kegiatan, adanya media dan publikasi yang menjelaskan prosedur aktivitas dan rincian keuangan, penyediaan laporan berkala terkait penyalahgunaan sumber daya dalam proses kemajuan rencana kerja yang dapat diakses oleh publik.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahayu (2022), indikator transparansi meliputi: keberadaan dan kemudahan akses terhadap dokumen, kelengkapan serta keterbukaan informasi yang disajikan, terdapat transparansi dalam pelaksanaan prosedur, dan kerangka regulasi yang mampu

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mendukung bukti transparansi. Sedangkan menurut penelitian Aufa Moerrin & Priono (2022), indikator transparansi meliputi: komunikatif, konsistensi, kohesivitas, dan partisipasi.

Akuntabilitas berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu *accountability*, yang berarti kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau kondisi dimana seseorang atau lembaga dapat dimintai tanggung jawab. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, (2008) tentang Keterbukaan Informasi Publik, akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Akuntabilitas juga berarti kemampuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan pembangunan di pemerintahan (Fajri et al., 2024).

Lilis Saidah Napisah & Cecep Taufiqurachman (2020), menyebutkan bahwa prinsip – prinsip dalam akuntabilitas yaitu: transparansi, yaitu terkait dengan kemampuan sebuah organisasi untuk mengungkapkan informasi mengenai kinerjanya; kewajiban, yaitu berhubungan dengan cara organisasi dalam mengelola dampak dari kinerjanya; dapat dikendalikan, yaitu berkaitan dengan penyelesaian tugas yang diberikan secara efektif; tanggung jawab, yaitu mencakup standar kinerja yang telah ditetapkan; tanggapan, yaitu berkaitan dengan upaya organisasi untuk memenuhi harapan dari para pemangku kepentingan.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aufa Moerrin & Priono (2022), indikator akuntabilitas terdiri dari: akuntabilitas kejujuran dan hukum (*accountability for probity and legality*), akuntabilitas proses (*process accountability*), akuntabilitas program (*program accountability*), akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*).

Menurut Asmawanti et al., (2020), Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah suatu mekanisme yang digunakan pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya dalam mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya,

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

baik berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai target dan tujuan organisasi.

Untuk mencapai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), syarat yang harus dipenuhi antara lain: sistem pemerintahan yang menjamin aksesibilitas sumber daya yang tersedia, pimpinan dan seluruh staf di instansi terkait harus memiliki komitmen yang kuat, mampu menunjukkan hasil kinerja dengan baik, selalu berupaya mewujudkan visi dan misi organisasi, memberikan manfaat yang optimal, transparan, objektif, akurat, mampu menyampaikan capaian dalam mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan (Asmawanti et al., 2020).

Menurut Area (2020), laporan keuangan sektor publik adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan dari berbagai transaksi yang dilakukan oleh entitas sektor publik. Laporan ini merupakan komponen yang penting dalam mewujudkan akuntabilitas di sektor publik. Berdasarkan website resmi Trisakti (2024), sektor publik dapat diartikan mencakup seluruh lembaga, badan, dan organisasi yang dijalankan oleh pemerintah untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Hal ini meliputi instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta organisasi non-pemerintah yang fokus terhadap pelayanan publik. Tujuan sektor publik ini adalah untuk memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Audit adalah proses pengumpulan dan pemeriksaan bukti – bukti yang berkaitan dengan informasi tertentu. Kegiatan ini umumnya bertujuan untuk menghasilkan informasi laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku (Supriyanto et al., 2022). Menurut Arsyad (2023), laporan keuangan *audited* adalah laporan keuangan yang telah diaudit dan disertai dengan laporan hasil audit, termasuk opini mengenai kewajaran sebuah laporan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (2010), terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada: masyarakat; wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; pihak yang



# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (2010), laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang – undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (2010), pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan: menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan; menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran; menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil – hasil yang telah dicapai; menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber – sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (2010), laporan keuangan pokok terdiri dari:

- a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan garis besar sumber, alokasi, dan penggunaan kas pemerintah selama periode tertentu yang menunjukkan kepatuhan pemerintah terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) (Dr. Baldric Siregar, MBA., CMA., CA., 2017).

b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)

Laporan perubahan saldo anggaran lebih adalah laporan yang menggambarkan perubahan dan posisi saldo anggaran lebih dalam suatu periode. Saldo anggaran lebih berasal dari akumulasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)/Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA) tahun sebelumnya, tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang diperkenankan. Laporan ini hanya disusun oleh entitas pelaporan, dengan menyajikan unsur saldo anggaran lebih awal periode, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain – lain, dan saldo anggaran lebih akhir periode (Dr. Baldric Siregar, MBA., CMA., CA., 2017).

c) Neraca

Neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan suatu entitas yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Laporan ini disusun oleh entitas akuntansi serta entitas pelaporan. (Dr. Baldric Siregar, MBA., CMA., CA., 2017).

d) Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional adalah laporan yang menggambarkan kinerja pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam suatu periode (Dr. Baldric Siregar, MBA., CMA., CA., 2017).

e) Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan arus kas adalah laporan yang memberikan informasi terkait kas yang digunakan untuk aktivitas operasional, pendanaan, serta transitoris yang mencakup saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir dari kas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu.

Laporan ini disusun oleh bagian fungsi perbendaharaan umum (Dr. Baldric Siregar, MBA., CMA., CA., 2017).

f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan informasi perbandingan mengenai penambahan maupun pengurangan ekuitas pada tahun pelaporan saat ini dengan tahun sebelumnya. (Dr. Baldric Siregar, MBA., CMA., CA., 2017).

g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas laporan keuangan adalah sebuah penjelasan naratif atau rincian terkait dari angka – angka yang tercantum di dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. (Dr. Baldric Siregar, MBA., CMA., CA., 2017).

Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang pertama kali muncul di Kota Wuhan, China pada bulan Desember 2019. Virus ini menyebabkan berbagai tingkat keparahan penyakit, mulai dari gejala ringan hingga berat, dan menyebar ke berbagai negara dengan sangat cepat. Virus ini termasuk virus zoonotik, yaitu virus yang ditularkan dari hewan ke manusia. Kelelawar, tikus bambu, unta, dan musang yang merupakan inang umum dari virus ini (Putra, 2020).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peneliti mengumpulkan data dari website resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk periode tahun 2016 – 2023. Namun, untuk data tahun 2020 dan 2021 tidak disertakan dalam analisis penelitian ini dikarenakan pada periode tersebut, data tidak tersedia secara lengkap, sehingga tidak memenuhi kebutuhan data dalam penelitian ini. Data yang dikumpulkan mencakup laporan keuangan tahunan *audited* sebelum dan sesudah masa pandemi Covid-19 yang berfokus pada implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan. Laporan keuangan tahunan audited ini merupakan laporan keuangan yang telah disusun serta disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) serta berdasarkan kaidah

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah. Data laporan keuangan tahunan audited tersebut telah dipublikasikan melalui situs resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id).

## Uji Normalitas

Pengujian normalitas yang dilakukan peneliti adalah menggunakan Uji *Kolmogorov-Smirnov*.

**Tabel 4. 1 Uji Normalitas**

| <b>Uji <i>Kolmogorov-Smirnov</i></b> | <b><i>Unstandardized Residual</i></b> |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Nilai <i>Kolmogorov-Smirnov</i>      | 0,298                                 |
| <i>Sig.</i>                          | 0,103                                 |

Sumber: Data sekunder diolah dari *Laporan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2016 – 2019, 2022 – 2023)*

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar  $0,103 > 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan Uji *Kolmogorov – Smirnov*, data tersebut memiliki distribusi normal sehingga memenuhi syarat normalitas dalam model regresi.

## Uji Multikolinearitas

**Tabel 4. 2 Uji Multikolinearitas**

| <b>Model</b>  | <b><i>Collinearity Statistics</i></b> |                   |
|---------------|---------------------------------------|-------------------|
|               | <b><i>Tolerance</i></b>               | <b><i>VIF</i></b> |
| Transparansi  | 0,583                                 | 1,716             |
| Akuntabilitas | 0,583                                 | 1,716             |

*Dependent Variable:* Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Sumber: Data sekunder diolah dari *Laporan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2016 – 2019, 2022 – 2023)*

Pada tabel tersebut, nilai tolerance yang dimiliki variabel Transparansi dan variabel Akuntabilitas adalah  $0,583 > 0,10$ , sedangkan nilai VIF pada variabel Transparansi

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dan Akuntabilitas sebesar  $1,716 < 10$ . Artinya, dari pengujian ini tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi.

## Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 4. 3 Uji Heteroskedastisitas**

| <i>Model</i>  | <i>Sig.</i> |
|---------------|-------------|
| Transparansi  | 0,511       |
| Akuntabilitas | 0,620       |

*Sumber: Data sekunder diolah dari Laporan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2016 – 2019, 2022 – 2023)*

Pada tabel tersebut, pengujian menunjukkan nilai signifikansi variabel transparansi  $0,511 > \alpha = 0,05$ . Sedangkan untuk nilai signifikansi variabel Akuntabilitas sebesar  $0,620 > \alpha = 0,05$ . Artinya berdasarkan Uji Park, maka tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi.

## Uji Autokorelasi

**Tabel 4. 4 Uji Autokorelasi**

| <i>Model</i> | <i>Durbin – Watson</i> |
|--------------|------------------------|
| 1            | 2,098                  |

*Sumber: Data sekunder diolah dari Laporan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2016 – 2019, 2022 – 2023)*

Nilai DW sekitar 2 menunjukkan tidak adanya autokorelasi

Nilai DW  $< 2$  menunjukkan adanya autokorelasi positif

Nilai DW  $> 2$  menunjukkan adanya autokorelasi negatif.

Dalam penelitian ini nilai DW adalah sebesar 2,098 maka tidak adanya autokorelasi

## Analisis Regresi Berganda



**Tabel 4. 5 Analisis Regresi Berganda**

| <i>Model</i>  | <i>Unstandardized Coefficients</i> |                   | <i>Standardized Coefficients</i> | <i>t</i> | <i>Sig.</i> |
|---------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------|-------------|
|               | <i>B</i>                           | <i>Std. Error</i> | <i>Beta</i>                      |          |             |
| Transparansi  | 2,682                              | 0,627             | 0,505                            | 4,276    | 0,023       |
| Akuntabilitas | 3,822                              | 0,773             | 0,584                            | 4,945    | 0,016       |

*Sumber: Data sekunder diolah dari Laporan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2016 – 2019, 2022 – 2023)*

Berdasarkan tabel olah data di atas, nilai koefisien regresi dan konstanta dapat dilihat pada kolom *Unstandardized Coefficients*. Sehingga persamaan linier dengan dua variabel independen adalah sebagai berikut:

$$Y = -27,232 + 2,682X_1 + 3,822X_2$$

Koefisien untuk variabel transparansi adalah 2,682. Hal ini menunjukkan bahwa setiap satu peningkatan dalam Transparansi akan mempengaruhi peningkatan sebesar 2,682 dalam variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan asumsi konstan. Artinya transparansi memiliki pengaruh positif terhadap variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sedangkan untuk koefisien variabel akuntabilitas adalah 3,822. Hal ini menunjukkan bahwa setiap satu peningkatan dalam akuntabilitas akan mempengaruhi peningkatan sebesar 3,822 dalam variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan asumsi konstan. Artinya akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berkontribusi positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, meningkatkan kedua variabel independen, yaitu transparansi dan akuntabilitas dapat berpotensi meningkatkan nilai dari variabel dependen yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## Uji F

**Tabel 4. 6 Uji F**

| <i>Model</i> | <i>Sig.</i> |
|--------------|-------------|
| Regression   | 0,004       |

*Sumber: Data sekunder diolah dari Laporan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2016 – 2019, 2022 – 2023)*

Uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan (bersama – sama), maka baik digunakan untuk analisis regresi berganda. Hasil analisis ANOVA menunjukkan bahwa nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,004, yang menunjukkan lebih dari 0,05. Dengan kata lain  $0,004 < 0,05$  maka transparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara simultan (bersama – sama) terhadap variabel akuntansi kinerja instansi pemerintah (AKIP).

Transparansi merupakan salah satu unsur dalam teori *good governance* yang berperan penting dalam Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Dalam konteks instansi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, transparansi mengacu pada keterbukaan informasi mengenai pengelolaan, kebijakan serta pelaporan keuangan negara. Periode 2016 – 2023, menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan transparansi melalui pelaporan keuangan tahunan yang dapat diakses oleh publik melalui website resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Keterbukaan ini tidak hanya membantu masyarakat dalam memahami penggunaan anggaran, tetapi juga mendorong partisipasi publik untuk ikut serta melakukan pengawasan terhadap kinerja instansi pemerintah.

Adanya pandemi Covid-19 membawa tantangan baru transparansi dalam publikasi laporan keuangan. Pada tahun 2020 hingga tahun 2021 terdapat beberapa data yang tidak dipublikasikan di website resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang mengakibatkan peneliti kesulitan dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk analisis. Sehingga untuk tahun tersebut, dikecualikan dalam

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

proses analisis dan pengolahan data. Setelah pandemi Covid-19, Kementerian Keuangan Republik Indonesia mulai mengimplementasikan langkah – langkah untuk memperbaiki transparansi dalam laporan keuangan sehingga memungkinkan akses yang lebih baik terhadap data dan informasi.

Kinerja instansi pemerintah memiliki hubungan yang erat dengan transparansi dan akuntabilitas. Penerapan berbagai peraturan perundang – undangan yang mendukung konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat menciptakan kinerja pemerintah yang optimal dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan ini juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas kinerja pemerintah secara keseluruhan (Merchilia, 2024).

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wiyana et al., (2023), bahwa transparansi laporan keuangan memberikan dampak terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian, peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara akan berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga dapat menciptakan pemerintahan yang lebih bertanggung jawab.

Akuntabilitas merupakan salah satu faktor penting dalam pengelolaan keuangan negara yang berfungsi memastikan bahwa instansi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan Republik Indonesia bertanggung jawab atas penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sebelum pandemi Covid-19, Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah menunjukkan akuntabilitas yang kuat melalui pelaporan keuangan tahunan yang telah diaudit secara independen. Laporan ini mencerminkan kinerja keuangan yang transparan dan memberikan gambaran yang jelas bagaimana keuangan negara dialokasikan. Penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang selama ini diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), menunjukkan bahwa akuntabilitas yang tinggi berkontribusi pada kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* yang juga menekankan pentingnya akuntabilitas.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Namun, keadaan pandemi Covid-19 pada tahun 2020 hingga 2021, membawa tantangan baru bagi Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selama periode tersebut, terdapat keterbatasan dalam penyajian data dan informasi yang dapat diakses oleh publik, sehingga mengakibatkan kesulitan peneliti dalam menganalisis akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam hal ini akuntabilitas menjadi semakin penting, dikarenakan masyarakat juga mengharapkan pertanggungjawaban yang jelas mengenai pengelolaan keuangan negara, terutama dalam situasi pandemi.

Setelah pandemi, Kementerian Keuangan Republik Indonesia mulai meningkatkan kembali akuntabilitas dalam laporan keuangan tahunan. Secara keseluruhan, akuntabilitas mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), meskipun tantangan muncul selama pandemi Covid-19 yang mengakibatkan keterbatasan data. Tetapi pemerintah berkomitmen untuk memperkuat akuntabilitas tetap menjadi salah satu fokus utama dalam pengelolaan keuangan negara, karena hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang juga menekankan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik.

Salah satu tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh simultan antara transparansi dan akuntabilitas terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dalam laporan keuangan tahunan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pada hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa transparansi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan publik, sehingga mendorong instansi untuk lebih akuntabel dalam mengelola keuangan negara. Transparansi sendiri memiliki fungsi untuk mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang, sedangkan akuntabilitas berfungsi memastikan bahwa instansi bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kedua hal ini saling melengkapi dalam proses menciptakan lingkungan yang baik dalam pengelolaan keuangan negara.

Penelitian yang dilakukan mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2023, menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kepercayaan publik dan juga efektivitas pengelolaan keuangan negara. Namun,

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

terdapat kendala dalam pengumpulan data tahun 2020 dan 2021, yang kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19. Hal ini tentu saja mengganggu operasional instansi pemerintah, diantaranya yaitu menghambat dalam publikasi data.

Kebijakan darurat yang diterapkan selama pandemi Covid-19, seperti pembatasan sosial dan *lockdown* di berbagai tempat, mengakibatkan keterlambatan dalam pengumpulan dan pelaporan data, serta mengubah instansi dalam mengelola keuangan negara. Keterbatasan informasi data inilah menjadi tantangan tersendiri bagi peneliti. Meskipun demikian, penelitian kembali dilanjutkan dengan data tahun 2022 dan 2023 dengan data yang lebih lengkap. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemulihan serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas data pasca pandemi Covid-19. Sehingga meskipun transparansi dan akuntabilitas telah menjadi poin utama dalam penelitian ini, tetapi pandemi Covid-19 memiliki dampak berupa ketidaktersediaan data di tahun 2020 dan 2021.

## SIMPULAN

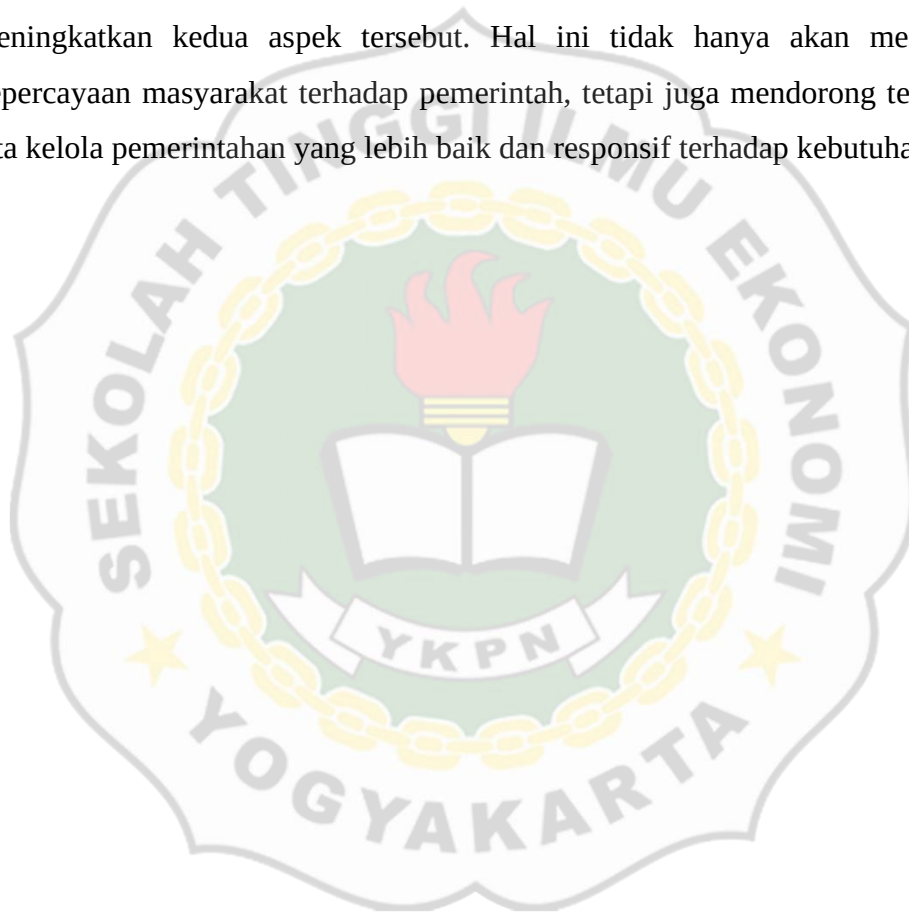
Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa transparansi memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dalam laporan keuangan tahunan Kementerian Keuangan Republik Indonesia *audited*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi dalam penyajian laporan keuangan semakin baik pula Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Selain itu, akuntabilitas juga terbukti berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang mengindikasikan bahwa instansi pemerintah yang mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang disajikan. Lebih lanjut, baik transparansi maupun akuntabilitas berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), sehingga menegaskan pentingnya kedua aspek ini dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.



# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pentingnya hasil penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Dengan memahami bahwa transparansi dan akuntabilitas saling berhubungan dan berkontribusi pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), para pembuat kebijakan dan praktisi dapat menciptakan strategi yang lebih baik untuk meningkatkan kedua aspek tersebut. Hal ini tidak hanya akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan publik.



## DAFTAR PUSTAKA

- Algifari. (1997). *Analisis Statistik untuk Bisnis dengan Regresi, Korelasi dan Nonparametrik*.
- Algifari. (2015). *Analisis Regresi*. BPFE-Yogyakarta.
- Algifari. (2018). *Statistika Deskriptif Plus Untuk Ekonomi dan Bisnis (Kedua)*. UPP STIM YKPN.
- Anggaran, P., Kinerja, B., & Kejelasan, D. A. N. (2021). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (Lpmp) Provinsi Lampung. *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya*, 6(1), 47–56. <https://doi.org/10.35968/jbau.v6i1.625>
- Anugrahni Anatasya Dea. (2021). Bab II Dasar Teori dan Pengembangan Hipotesis. *Teori Prospek, Teori Fuzzy-Trace, Keputusan Individu-Kelompok, Dan Tanggung Jawab Dalam Pengambilan Keputusan*, 1981, 1–22. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Area, M. I. A. P. U. M. (2020). *What is a Public Sector Financial Report?* Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area. <https://map.uma.ac.id/2020/10/apa-itu-laporan-keuangan-sektor-publik/>
- Arsyad, M. (2023). Dampak Redenominasi Rupiah terhadap Penyajian Laporan Keuangan Audited. *AKUNSIKA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4, 57–62. <https://doi.org/10.31963/akunsika.v4i2.4277>
- Asmawanti, D., Sari, A. M., Fitranita, V., & Wijayanti, I. O. (2020). Dimensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 85–94. <https://doi.org/10.30871/jaat.v5i1.1850>
- Aufa Moerrin, D., & Priono, H. (2022). Pengaruh Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Pegawai. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(11), 4857–4868. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i11.1780>
- Dewata, E. ., Sari, Y. ., Jauhari, H. ., & Lestari, T. D. (2020). Ketaatan pada Peraturan Perundangan, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi

- Pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(3), 541–550.
- Dr. Baldric Siregar, MBA., CMA., CA., A. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)* (Edisi II.). UPP STIM YKPN.
- Fajri, M. A., Tareq Aziz, M., & Arif, M. (2024). Analisis Dampak Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Tata Kelola Keuangan Di Kementerian Agama Sumatera Utara: Studi Kepustakaan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisni*, 2(1), 117–128.
- Febrianti, T., & Indrawati Yuhertiana. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *E-Bisnis : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 137–146. <https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v14i1.381>
- Febrianty, K., & Atmadja, A. T. (2021). Mengungkap Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan pada Pengelolaan Sumber Mata Air Pura Dalem Penyuratan di Banjar Badung Desa Bungkulan , Kecamatan Sawan , Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 11(3), 489–497.
- Hai, K. A., Watulingas, R. R., & Singal, R. (2021). *Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) di Era Pandemi Covid 19 Menurut Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015*. 71(1), 63–71.
- Iii. (2020). Pengaruh antara Struktur Modal, Pertumbuhan Perusahaan dan Firm Size terhadap Nilai Perusahaan. *Skripsi*, 24–41.
- Ika, N., Fitriyah, Z., & Dewi, N. C. (2020). Impulse Buying Di E-Commerce Shopee. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, 3, 57–61.
- Israr, N. H., & Syofyan, E. (2022). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Penerapan Good Governance terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(4), 686–697. <https://doi.org/10.24036/jea.v4i4.550>
- Judijanto, L., Sudarmanto, E., & Triyantoro, A. (2024). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Laporan Keuangan Sektor Publik. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen West Science*, 3(02), 223–233.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

<https://doi.org/10.58812/jbmws.v3i02.1160>

Lilis Saidah Napisah, & Cecep Taufiqurachman. (2020). Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Di Kabupaten Bandung. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 6(2), 79–88. <https://doi.org/10.38204/jrak.v6i2.397>

Maharani, O. H., Hariani, I., Anjelia, M., & Putri, A. M. (2024). *Analisis Penerapan Good Government Governance yang Transparan dan Akuntabilitas di Era Digital*. 3(2), 11–20.

Maolani, D. Y. (2023). Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 3. <http://jurnaldialektika.com/>

Maranjaya, A. K. (2022). Good Governance Sebagai Tolak Ukur Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(11), 929–941. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v2i11.474>

Mariam, aan. (2023). Pengaruh Budaya Organisasi dan Lingkungan Kerja Fisik terhadap Kinerja Karyawan di PT. Multijaya Adyaraya Lampung Utara. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.

Maulana, Z., & Lubis, N. K. (2020). Pengaruh Transparansi Pelaporan Keuangan Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 4 Nomor 1(2655-187X), 1–14.

Meinarsih, T., Suratman, A., & Hidayati, N. (2020). The Effect of Application of Accrual-Based Government Accounting Standards, Apparatus Quality, Public Accountability and Government Internal Control Systems on Quality of Financial Statements. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 5(8), 452–460. <https://doi.org/10.38124/ijisrt20aug142>

Merchilia, S. (2024). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bengkulu. *Ayan*, 15(1), 37–48.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). (2010). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

- Purwaningsih, S. (2022). The Impact of Good Corporate Governance as a Moderation of Company Performance on the Timeliness of Submitting Financial Statements. *Journal of Economics, Finance And Management Studies*, 05(01), 211–220. <https://doi.org/10.47191/jefms/v5-i1-26>
- Putra, B. A. R. (2020). *Bab II*.
- Quraissy, A. (2022). Normalitas Data Menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. *J-HEST Journal of Health Education Economics Science and Technology*, 3(1), 7–11. <https://doi.org/10.36339/jhest.v3i1.42>
- Rahayu, S. (2022). Pengaruh Nilai Transparansi, Akuntabilitas Dan Konsep Value For Money Terhadap Pengelolaan Keuangan Di Bidang Sektor Publik Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (BAPPEDASU). *Skripsi Universitas Medan Area*, 14.
- Saharani, R. P., & Suharni, S. (2023). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Transparansi, Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *JAMER : Jurnal Akuntansi Merdeka*, 4(1), 66–74. <https://doi.org/10.33319/jamer.v4i1.101>
- Saputri, A., Basri, Y. M., & Hasan, M. A. (2022). Determinan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis*, 7(2), 151–162. <https://doi.org/10.24967/ekombis.v7i2.1810>
- Shahib, H. M., Hasanuddin, M. R., Nurdin, Y., Palete, S., Mika, F., & Rahayu Saputri, R. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Pemerintah di Era Covid-19 Pada Website Pemerintah Daerah Se-Indonesia. *Jurnal Transformative*, 8(1), 102–127. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2022.008.01.5>
- Supriyanto, S., Pina, P., Christian, C., & Silvana, V. (2022). Menganalisis Indikator Kualitas Audit Pada Perusahaan Audit Di Indonesia. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(1), 199–210. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.520>
- Trisakti, U. (2024). *Sektor Publik: Definisi, Peran, dan Karakteristik*. Universitas Trisakti. [3asp.feb.trisakti.ac.id/sektor-publik-definisi-peran-dan-karakteristik/](https://3asp.feb.trisakti.ac.id/sektor-publik-definisi-peran-dan-karakteristik/)
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan



# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Informasi Publik, Pub. L. No. 14, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 53 (2008).

- Veronica Wongkar, F., . S., Masiaga, N., Abdullah, J., & Nurannisa Hippy, M. (2024). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 4(4), 580–584. <https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1908>
- Wiyana, A., Sufiati, S., Sambo, E. M., & Nurasratunnisa, Y. (2023). Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 9(2), 240. <https://doi.org/10.35906/jurakun.v9i2.1588>
- Yudiaatmaja, F. (2013). *Analisis Regresi dengan Menggunakan Aplikasi Komputer Statistik SPSS*.
- Zahra, A., Arif Lubis, F., & Harmain, H. (2023). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Journal of Management & Business.*, 6(2), 236–247.